



## **BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI**

Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

**PENGUMUMAN *REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)* DAN  
PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA  
RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI  
KAJIAN ALOKASI ASET TERHADAP KEWAJIB  
Nomor: B. 13014/BPKH/BP/A7.4/07/2021**

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

- Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Kajian Alokasi Aset terhadap Kewajiban.
- Ruang Lingkup Pekerjaan : Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab untuk melakukan hal – hal, sebagai berikut:
- a. Menyusun Kajian Alokasi Aset terhadap Kewajiban termasuk draft awal kajian;
  - b. Melakukan asesmen dan simulasi terhadap jenis investasi, jangka waktu, risiko, ekspektasi imbal hasil, arus kas, underlying aset investasi serta bentuk investasi yang relevan dengan surat berharga selanjutnya disesuaikan dengan profil kewajiban dimasa mendatang;
  - c. Melakukan pemodelan dengan metode *advance* terkini dalam menggambarkan hubungan jenis investasi, jangka waktu, risiko, ekspektasi imbal hasil, arus kas, underlying aset investasi serta bentuk investasi yang relevan dengan surat berharga yang memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan dana Haji;
  - d. Melakukan Proses simulasi dengan pendekatan *advance* sebagai lanjutan hasil pemodelan sehingga mampu menghasilkan nilai optimalisasi pendapatan yang paling optimal dan sesuai dengan kebutuhan kewajiban dana haji dimasa yang akan datang;
  - e. Melakukan *forecasting analysis* dengan pendekatan *advance* agar mampu memprediksi pendapatan dana haji dimasa yang akan datang hasil dari pemodelan sebelumnya.
  - f. Format Kajian dapat merujuk pada kaidah penulisan laporan penelitian yang berlaku secara umum dalam penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik;
  - g. Membuat paparan kepada BPKH terhadap hasil pekerjaan

- Kebutuhan Tenaga Ahli/Personil : Penyedia terpilih wajib menyediakan 3 (tiga) orang Tenaga Ahli/Personil, dengan rincian:
- a. Tenaga Ahli Bidang Manajemen Keuangan, dengan kualifikasi:
    - a) Pendidikan minimal strata dua (S-2) dari Perguruan Tinggi Terakreditasi A BAN-PT.
    - b) Berpengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun dalam analisa pemodelan Ekonometrika dan pemodelan *Advance* di bidang Manajemen Keuangan baik di Lembaga Pemerintah maupun Swasta, dibuktikan dengan hasil kajian sebelumnya.
  - b. Tenaga Ahli Bidang Bidang Statistik/Pengolahan Data Ilmiah, dengan kualifikasi:
    - a) Pendidikan minimal strata satu (S-1) dengan jurusan statistika;
    - b) Berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam pengolahan data;
    - c) Berpengalaman dengan *Machine Learning* dan pernah melakukan simulasi optimasi modelling dengan pendekatan Artificial Intellegence menggunakan aplikasi statistik seperti R *statistical software*, dibuktikan dengan hasil kajian sebelumnya.
  - c. Tenaga Ahli Bidang Aktuaris, dengan kualifikasi:
    - a) Pendidikan minimal strata satu (S-1) dengan jurusan akuntansi/ekonomi;
    - b) Berpengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun dalam bidang / Aktuaris / Asuransi / Pasar modal / Konsultan Keuangan;
    - c) Berpengalaman dalam membuat model penyesuaian asset terhadap kewajiban.
- Syarat Izin Usaha dan Syarat Teknis Lainnya :
  - Memiliki izin usaha dengan Kategori/Kode KBLI 7020 (Aktivitas Konsultasi Manajemen).
  - Berpengalaman dalam pembuatan Kajian pada lembaga Keuangan, Regulator/Lembaga Negara dengan bukti berupa SPK / PKS.
- Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 60 (enam puluh) hari kalender
- Keluaran (*Output*) : 1 (satu) Paket Pekerjaan dengan Keluaran (*Output*), berupa: 1 (satu) set dokumen Kajian Alokasi Aset terhadap Kewajiban.
- Perkiraan Maksimal Biaya : Rp90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).

**Pernyataan Pelaku Usaha:**

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam *Vendor Management System* (VMS) BPKH, **diwajibkan** untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan <http://vendor.pengadaan.com/> dan **mengirimkan screen shot halaman isian data Pelaku Usaha yang bersangkutan di portal pengadaan.com** kepada Divisi Pengadaan dan Umum BPKH melalui *email* [divisi.pengadaan@bpkh.go.id](mailto:divisi.pengadaan@bpkh.go.id) paling lambat pada hari **Jum'at, 16 Juli 2021 Pukul 23.59 WIB** dengan *Subject: Pendaftaran Rencana Pengadaan Konsultan Kajian Alokasi Aset thd Kewajiban*, serta dilanjutkan dengan login di <https://eproc.bpkh.go.id/>.

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menyampaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui *login* ke Aplikasi Pengadaan (<https://eproc.bpkh.go.id/>) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan. Petunjuk pemasukan/input perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan mengakses : Menu Bantuan > Panduan. Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman yang paling sesuai dan menyampaikan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa.

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
1.	Pendaftaran Pelaku Usaha	Selasa – Jum'at, 13 – 16 Juli 2021	Selasa, 16.00 WIB	Jum'at, 23.59 WIB
2.	Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal pengadaan.com			
3.	Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan			
4.	Pengumuman RFQ/RFI ( <i>Vendor Survey</i> )	Selasa – Senin, 13 – 19 Juli 2021	Selasa, 16.00 WIB	Senin, 12.00 WIB
5.	Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha			
6.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih	Rabu – Jum'at, 21 – 23 Juli 2021	Rabu, 08.00 WIB	Jum'at, 23.59 WIB
7.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Senin – Kamis, 26 – 29 Juli 2021	Senin, 08.00 WIB	Kamis, 23.59 WIB
8.	Penandatanganan SPK	Jum'at, 30 Juli 2021	08.00 WIB	17.00 WIB

**Keterangan:**

\*= Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan

**Pernyataan Pelaku Usaha:**

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. **Petunjuk singkat dan persyaratan umum pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Juli 2021

TTD

Pelaksana Pemilihan pada  
Badan Pengelola Keuangan Haji

**Pernyataan Pelaku Usaha:**

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Lampiran Pengumuman

Nomor : B. 13014/BPKH/BP/A7.4/07/2021

Tanggal : 13 Juli 2021

**PETUNJUK SINGKAT DAN PERSYARATAN UMUM**

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KIPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
<b>DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN - WAJIB</b>									
1	Akte Pendirian	- Akte Pendirian		V	V	V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Keputusan Dewan Fakultas						V	
		- Chamber of Commerce Business Register							V
	Akte Perubahan	Akte Perubahan (atas Pengangkatan Pejabat Komisaris dan Direksi)		V	V				
	SK Kemenkumham (Akte Pendirian)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Pendirian)		V	V	V			
	SK Kemenkumham (Akte Perubahan)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Perubahan)		V	V				
2	Domisli	- Surat Keterangan Domisili (yg dikeluarkan oleh Kelurahan) atau Izin Lokasi/NIB (yg dikeluarkan oleh OSS)		V	V	V			
		- Profile Notaris					V		
		- Keputusan Dewan Fakultas						V	
		- Chamber of Commerce Business Register						V	
3	NPWP Perusahaan	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan		V	V	V	V	V	
4	SPT	Setoran Pajak Tahunan		V	V	V	V	V	
5	SIUP	- Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha (NIB)		V					
		- Surat Keputusan Menteri Keuangan perihal Izin Usaha KAP				V			
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)						V	
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number						V	
6	TDP	- Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha		V	V				
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)						V	
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number						V	

**Pernyataan Pelaku Usaha:**

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
7	Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba	- Laporan Neraca 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
		- Laporan Rugi / Laba 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
<b>DOKUMEN PERSONAL - WAJIB</b>									
8	KTP/Passpor/ KITAS Komisaris & Direksi	- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Komisaris		V	V	V			V
		- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Direksi	V	V	V	V	V	V	V
9	NPWP Komisaris & Direksi	Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi Komisaris & Direksi	V	V	V	V	V	V	
10	Ijazah Terakhir Tenaga Ahli	Ijazah Pendidikan Formal terakhir untuk Tenaga Ahli Utama	V	V	V	V	V	V	V
<b>DOKUMEN NON LEGALITAS - WAJIB</b>									
11	Surat Pernyataan Vendor	Surat Pernyataan Vendor (Format Pengadaan.com)	V	V	V	V	V	V	V
12	Kontrak/ Perjanjian/ SPK dr pengalaman perusahaan (4th terakhir)	Surat Perjanjian Kerjasama / PO	V	V	V			V	V
13	Struktur Organisasi	Bagan Struktur Organisasi dalam bentuk Chart		V	V	V	V	V	V
<b>DOKUMEN LEGALITAS - TIDAK WAJIB</b>									
14	Izin Lain-lain	Perizinan seperti IUIK		V	V	V			
15	Surat Keagenan	Perizinan Keagenan atau NIB		V					
16	Angka Pengenal Impor	Angka Pengenal Impor atau NIB		V					
17	Sertifikasi Perusahaan	- Sertifikasi Perusahaan		V		V	V		V
		- Surat Tanda Terdaftar KAP OJK		V	V				
18	Sertifikasi Tenaga Ahli	Sertifikasi Tenaga Ahli	V	V	V	V	V	V	V
19	NIB	Nomor Induk Berusaha		V	V				
20	PKP	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak		V	V	V		V	

#### Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan, menunda proses pengadaan, dan/atau memilih secara mutlak Pelaku Usaha yang akan diundang mengikuti tahapan Pengadaan Langsung, dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.